



## Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat

**Na'imah Putri Rahayu**

Universitas Negeri Semarang

**Nita Ayuningsih**

Universitas Negeri Semarang

**Vania Aulia**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [naimahputri04@students.unnes.ac.id](mailto:naimahputri04@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** This study analyzes the role of political parties in representing the interests of various groups of society. Political parties function as intermediaries that connect people's aspirations with government policies. The effectiveness of parties in carrying out this function determines the quality of democracy. This study finds that although political parties have great potential to represent the interests of diverse groups, they often fail to do so due to various obstacles such as corruption, nepotism, and lack of transparency. The results show that to increase effective representation, political parties need to improve their recruitment systems, increase openness and accountability, and be more responsive to social dynamics and community aspirations. Thus, political parties can function better as a true representation of the people's interests and strengthen the foundations of democracy.

**Keywords:** Political Party, Representation, Society.

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis peran partai politik dalam representasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Partai politik berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Efektivitas partai dalam menjalankan fungsi ini sangat menentukan kualitas demokrasi. Studi ini menemukan bahwa meskipun partai politik memiliki potensi besar untuk mewakili kepentingan beragam kelompok, mereka sering kali gagal melakukannya akibat berbagai kendala seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan representasi yang efektif, partai politik perlu memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, serta lebih responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, partai politik dapat berfungsi lebih baik sebagai representasi sejati dari kepentingan rakyat dan memperkuat fondasi demokrasi.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Representasi, Masyarakat.

### PENDAHULUAN

Partai politik memainkan peran penting dalam demokrasi sebagai institusi politik yang demokratis. Partai politik memiliki kekuatan untuk menjamin bahwa demokrasi suatu negara akan bertahan. Tentu saja, hal ini perlu dipasangkan dengan jenis rezim yang berkuasa serta struktur politik. Karena hasrat untuk berkuasa, stabilitas politik, dan keberlangsungan sistem politik merupakan variabel yang harus dijaga dan menjadi

kewajiban yang dibebankan kepada partai politik, maka partai politik memikul beban kepentingan yang berat sebagai organisasi politik.

Dalam berbagai pandangan, ada sebagian yang mengatakan bahwa partai politik adalah "organisasi", tetapi ada pula sebagian yang mengatakan "perkumpulan" atau sebagian yang lain mengatakan "kelompok". Istilah-istilah ini merujuk pada satu persepsi yang sama, yakni partai politik merupakan kumpulan orang-orang atau sekelompok kecil orang yang memiliki kehendak dan cita-cita yang sama. Cita-cita yang dimaksud direfleksikan dalam bentuk visi-misi bersama dan program kerja.<sup>1</sup>

Lebih jauh lagi, karena tujuan awal partai politik adalah untuk mengakomodasi berbagai ambisi masyarakat yang berbeda untuk dihubungkan dengan aktor negara, khususnya pemerintah, perilaku negatif ini membuat peran mereka semakin tidak efektif. Di sisi lain, partai-partai politik lebih berfokus pada keuntungan pribadi mereka sendiri dan tidak akan berhenti untuk memastikan bahwa kandidat mereka terpilih, sehingga semakin sulit untuk menjembatani aspirasi masyarakat Indonesia dengan pemerintah sebagai akibat dari tindakan negatif yang dilakukan.

## **KAJIAN TEORI**

Partai politik telah memainkan peran penting dalam membentuk sistem politik nasional, terutama mengingat sifat masyarakat Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Meningkatkan kemampuan dan efektivitas partai politik dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan standar demokrasi dan efektivitas sistem politik. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat serta meningkatkan demokrasi, fungsi partai politik perlu ditingkatkan dari segi kemampuan, kualitas, dan kinerjanya. Komponen demokrasi yang paling penting adalah partai politik, yang juga bertanggung jawab untuk menjalankan demokrasi di dalam sebuah negara. Jika sebuah negara mengalami kekacauan dan pemerintahan yang tidak terorganisir, partai politik adalah entitas utama yang bertanggung jawab atas hal ini. Kader-kader partai politik yang memicu kekacauan adalah alasan di balik hal ini. Publik mengharapkan partai politik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan, melalui kader-kadernya yang memerintah, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan partai politik yang berkaliber tinggi untuk menghasilkan pemimpin dan pelayan publik yang berkaliber tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Kata dasar "*metodologi*" dan "*logos*" berasal dari kata dasar "*metodologi*", yang berarti "cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis)," dan "*logos*" berarti "ilmu yang berdasarkan logika berpikir." Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Dengan demikian, metode tertentu

---

<sup>1</sup> Hermansyah, S. H., M. Hum. (2020), *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana), hlm. 1.

## Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat

diperlukan untuk penelitian ini agar berhasil dan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyusun penelitian ini, metode berikut digunakan:

### Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah library research yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat berbagai referensi atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan seperti, buku-buku bacaan, kitab Undang-Undang, jurnal ilmiah, setelah itu disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis dengan metode penelitian deskriptif normatif. Untuk mendukung penelitian ini, pendekatan normatif digunakan. Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian perundang-undangan dan meninjau teori dan konsep peraturan yang relevan dengan topik penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif karena penyusun menguraikan secara sistematis melalui perspektif hukum atau peraturan yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan masalah tentang peran partai politik dalam mewakili kepentingan masyarakat.

#### c. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang berisi aturan normatif adalah subjek penelitian, sehingga data sangat penting untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dan diproses dari kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Fokus penelitian ini adalah tentang peran partai politik dalam mewakili kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, sumber data berikut digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari kitab Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*)

Publikasi hukum adalah dokumen yang tidak resmi. Termasuk dalam publikasi tersebut adalah buku referensi yang membahas sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, jurnal hukum, dan bahan lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

#### d. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: "Penelitian kepustakaan dan melalui media internet yang dilaksanakan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat berbagai referensi atau bahan bacaan yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis."

#### Metode Pengolahan Data

Penulis kemudian mengolah data dan bahan hukum secara menyeluruh untuk menyesuaikannya dengan masalah yang akan diteliti. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan metode berikut:

- a. Mengidentifikasi data adalah menetapkan data dengan menggolongkannya dan menyusunnya sesuai aturan.
- b. Klarifikasi data adalah menetapkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga data yang diperoleh menjadi objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Editing data adalah memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan atau apakah sudah sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- d. Sistematika sistem adalah mengevaluasi data yang diperoleh.

#### Metode Analisis Data

Setelah data disusun secara sistematis sesuai dengan topik penelitian, data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian kalimat dari uraian secara umum ke uraian khusus. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran partai politik dalam mewakili kepentingan masyarakat.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, definisi partai politik adalah "*organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Kedudukan sentral partai politik dalam demokrasi menjadi salah satu penentu perkembangan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan negara, oleh Allen Hicken menyebutkan keberadaan partai politik menentukan sehat tidaknya pemerintahan demokratis, sifat dan kualitas representasi/perwakilan, stabilitas pemerintahan dan kualitas kebijakan publik. Sejalan dengan itu, Djayadi Hanan menekankan bahwa dengan peran sentral partai politik maka kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia banyak bergantung pada kualitas partai politik, sehingga bagi Hanan memperkuat dan meningkatkan kualitas

## Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat

partai politik akan banyak membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan. Sebaliknya, ketika partai politik bermasalah akan menjadi hulu persoalan terhadap buruknya kualitas demokrasi dan pemerintahan.<sup>2</sup>

Robert Huckshom<sup>3</sup> mengatakan bahwa:

"Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dipemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan."

Partai politik adalah produk dari masyarakat, keberadaan mereka menunjukkan bahwa penduduk kita beragam dan memiliki kebutuhan yang berbeda; hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa ada banyak partai politik, masing-masing mewakili kepentingan dan tuntutan tertentu dari konstituen mereka. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini adalah bahwa masyarakat tidak percaya pada partai politik, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ada kandidat bebas di PILKADA. Akibatnya, partai politik harus bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan menggalang dukungan massa. Di dalam sebuah partai politik, seharusnya ada hubungan fungsional yang menunjukkan adanya gerakan yang mengitari bagan yang menjaga eksistensi sistem. Sejumlah norma dalam sistem telah dikodifikasikan bersama.

Meskipun publik mengharapkan kader-kader yang terampil untuk memimpin bangsa ini, proses rekrutmen partai ini belum menghasilkan kader-kader seperti itu dalam sejarahnya. Namun, terkadang, proses rekrutmen dan kaderisasi tidak transparan. Sebagai contoh, banyak partai politik yang merekrut artis sebagai anggota. Tak perlu dikatakan bahwa masuknya artis ke dalam partai politik memberikan mereka harapan untuk meraih kesuksesan pemilu yang lebih besar. Diperkirakan bahwa dengan semakin banyaknya artis yang menjadi kader, partai politik akan menjadi lebih mudah dipilih. Potensi artis untuk bergabung dengan partai politik tampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam perekrutan ini. Ada banyak artis Indonesia yang tidak memiliki latar belakang politik yang jelas, sehingga pekerjaan artis dipandang tidak memadai setelah pemilihan umum dan menjadi anggota parlemen. Akibatnya, partai-partai politik sering kali mengabaikan pentingnya pembaharuan.

Kapasitas partai politik untuk tetap berkuasa secara signifikan dipengaruhi oleh fungsi rekrutmen politik. Partai politik dapat menarik kader-kader baru untuk membantu mereka membangun dan mengelola organisasi berkat sistem rekrutmen politik. Proses perekrutan kandidat politik juga berupaya untuk menarik calon-calon pemimpin potensial yang akan disediakan untuk publik. Czudnomski mengikuti dua pola dalam memilih

---

<sup>2</sup> Djayadi Hanan (2021), *Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*, Lihat Demokrasi Tanpa Demos: refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia, (Depok: Pustaka LP3ES, ), h.108

<sup>3</sup> Robert Huckshom. *Political Parties in America*. Brooks/Cole, Monterey: 1984, h. 10. Periksa John Kenneth White, Apakah Partai Politik itu? dalam Richard S. Katz & William Crorty. *Handbook Partai Politik*, terjemahan dari *Handbook of Party Politics*, Bandung Nusamedia, 2014, h. 3.

kandidat melalui partai politik: pola terbuka dan pola tertutup. Indonesia biasanya mengikuti sistem tertutup.<sup>4</sup>

### **Peran Partai Politik yang sesungguhnya**

Partai politik adalah pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia, sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia. Partai politik diakui sebagai bagian integral dari kehidupan bernegara. sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 yakni “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*”. Partai politik dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pemimpin partainya, serta memberikan manfaat baik idiil maupun materiil kepada anggotanya. Partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan suatu sistem politik. Aktivitas partai politik tak terpisahkan dari pengelolaan negara, berfungsi sebagai instrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur tanpa mengguncang stabilitas masyarakat dan negara yang telah mapan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan perannya, partai politik memiliki tujuan, baik umum maupun khusus, sesuai dengan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008:

Tujuan umum partai politik adalah:<sup>6</sup>

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

---

<sup>4</sup> Hajad, V. (2016). *Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), hlm. 63–70.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/563/pdf>

<sup>5</sup> Nuruddin dan Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (NTB : CV. Alfa Press, 2022), hal 299. <https://repository.uinmataram.ac.id/1713/1/BUKU%20HUKUM%20TATA%20NEGARA.pdf>

<sup>6</sup> Ibid. hal 301

## Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat

3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan partai politik diwujudkan secara konstitusional.

Partai politik juga memiliki fungsi dalam menjalankan perannya. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik", terdapat empat fungsi utama partai politik, yaitu:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik;
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik;
- d. Sebagai sarana pengelola konflik.<sup>7</sup>

Selain itu, menurut para ahli, fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luar agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
3. Meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia;
4. Melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh partai politik, ada lima yang penting, yaitu:

1. Mengagregasikan kepentingan dan nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat.
2. Menyusun, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum partai mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk jabatan publik serta kursi di parlemen.

---

<sup>7</sup> Ibid. hal 302

5. Memasyarakatkan, mendidik, dan menawarkan kepada anggotanya saluran yang efektif untuk partisipasi politik mereka selama masa antara pemilu.<sup>8</sup>

Organisasi yang berperan dalam proses penyusunan konsep kepentingan meliputi sektor perantara dan masyarakat madani. Sektor perantara menghubungkan masyarakat dengan sistem politik, seperti kelompok kepentingan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, kelompok inisiatif warga, dan organisasi keagamaan. Masyarakat madani muncul dari berbagai inisiatif yang berfokus pada tujuan dan masalah seperti lingkungan hidup, HAM, dan gender. Perbedaan antara kelompok kepentingan dan masyarakat madani adalah bahwa kelompok kepentingan hanya melayani anggota mereka, sementara masyarakat madani diharapkan merangkul kepentingan umum. Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, partai politik memainkan peran khusus yang tidak dapat digantikan oleh organisasi lain. Peran penting tersebut menempatkan partai politik di posisi pusat, yaitu:

Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat, partai politik mentransformasikannya menjadi agenda yang dapat dijadikan sebagai susunan tujuan dan aksi konkret yang biasanya dijabarkan saat kampanye pemilu. Diharapkan hal ini mampu menarik banyak suara rakyat sehingga partai politik mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya, partai politik harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan pelaksanaan program kebijakan publik. Partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat, dan ini bisa mereka lakukan setelah mendapatkan posisi yang kuat di parlemen daerah maupun nasional.<sup>9</sup>

### **Realita Peran Partai Politik di Masyarakat Sekarang**

Dengan kondisi masyarakat yang semakin berkembang, masyarakat cenderung memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini juga menjadi tantangan partai politik dalam mewakili kepentingan masyarakat yang semakin berkembang. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang terhadap partai politik juga menjadi tantangan besar bagi partai politik. Dari survei yang diadakan oleh Indikator Politik Indonesia ([indikator.co.id](http://indikator.co.id)), politsi dan partai politik mendapatkan skor kepercayaan paling rendah dibandingkan dengan Menteri dan Presiden.<sup>10</sup>

Confusius, ketika ditanya apa saja syarat-syarat politik, menjawab, "Kecukupan makanan, kecukupan senjata, dan kepercayaan rakyat." Ketika ditanya apa yang harus

---

<sup>8</sup> Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012), hal. 27-28. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09836.pdf>

<sup>9</sup> Ibid. hal 33

<sup>10</sup> Burhanuddin Muhtadi (2013). *Internet, APATISME, Dan Alienasi Politik*. Lembaga Survei, Politik Indonesia, Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilkada, Indikator. Diakses pada 1 Juni 2024 pukul 09:00 dari <https://indikator.co.id/internet-apatisme-dan-alienasi-politik/>.

## Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat

dilakukan jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, Confusius menjawab, "Berpisahlah dengan senjatamu, lalu makananmu. Kematian tidak dapat dihindari oleh seluruh umat manusia, tetapi tanpa kepercayaan rakyat, tidak akan ada pemerintahan atau masyarakat. Jika pemerintah kehilangan kepercayaan, penguasa yang berdaulat harus pergi".<sup>11</sup> Hal ini berarti tanpa adanya kepercayaan masyarakat, maka tidak akan ada Pemerintahan (*Government*).

James Bryce (1921: 119) menyatakan bahwa 'partai-partai tidak dapat dihindari. Tidak ada yang bisa menunjukkan bagaimana pemerintahan perwakilan bisa berjalan tanpa partai-partai itu'. Artinya dalam pemerintahan, partai politik tetap memegang peran yang penting. Terlalu dini untuk menyatakan kematian bagi partai politik. Teori politik dan publik kontemporer sepakat bahwa partai politik merupakan elemen esensial dan tak terpisahkan dalam proses demokrasi.<sup>12</sup> Sumbangan positif dari partai politik tidak dapat disangkal, dan keberadaan demokrasi tanpa partai politik masih sulit dibayangkan.

Namun, pada saat yang sama, masyarakat saat ini menunjukkan skeptisisme yang meluas terhadap partai politik sebagai lembaga dan proses pemerintahan perwakilan yang bergantung pada partai politik. Mayoritas warga negara berpendapat bahwa partai-partai politik tidak memperhatikan aspirasi mereka, tidak cukup responsif terhadap kepentingan publik, dan tidak dapat dipercaya untuk mewakili kepentingan umum. Sentimen semacam ini juga semakin umum di kalangan generasi sebelumnya.

Demokrasi mempertahankan legitimasinya terutama melalui prosedur pemilu yang bebas dan adil. Karena warga negara di seluruh dunia menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan perwakilan yang ideal (Klingemann 1999, 38-46), maka proses pemilihan umum yang bebas dan adil dianggap dapat memenuhi harapan publik akan keterwakilan dan responsivitas pemerintah dan parlemen. Meskipun bentuk pemerintahan demokratis telah menyebar, skeptisisme dan ketidakpercayaan warga terhadap lembaga-lembaga politik dan para pemimpin politik di negara-negara demokrasi yang belum terkonsolidasi telah meluas.<sup>13</sup>

Mengapa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin berkurang setiap tahunnya? Hal ini dikarenakan banyaknya kasus korupsi di kalangan politisi partai yang menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan publik. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

---

<sup>11</sup> Kazumasa Kusaka (2021) *Without the Trust of the People, There Can Be No Government' from the Analects of Confucius*, Japan Economic Foundation. Diakses pada 1 Juni 2024 pukul 09:15 dari [https://www.jef.or.jp/journal/pdf/236th\\_Publishers\\_Note.pdf](https://www.jef.or.jp/journal/pdf/236th_Publishers_Note.pdf)

<sup>12</sup> Russell J. Dalton & Steven A. Weldon. (2005). *Public images of political parties: A necessary evil? West European Politics*, 28(5), hlm. 931–951. Diakses pada 4 Juni 2024 pukul 10:00 dari <https://doi.org/10.1080/01402380500310527>

<sup>13</sup> Myunghee Kim. (2007). *Citizens' confidence in Government, Parliament and political parties. Politics & Policy*, 35(3). hlm. 496-497. Diakses pada 5 Juni 2024 pada pukul 05:00 dari <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2007.00070.x>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa, *“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Ketidakpercayaan masyarakat ini semakin diperburuk oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik. Banyak partai politik yang tidak secara terbuka mengungkapkan sumber pendanaan mereka, atau bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan spekulasi mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif dan eksekutif sering kali tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan didominasi oleh praktik nepotisme dan patronase. Hal ini menyebabkan munculnya politisi yang kurang kompeten dan lebih berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, banyak partai politik yang gagal memfasilitasi komunikasi yang efektif dan inklusif dengan konstituen mereka. Ketidakmampuan ini menyebabkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diusung oleh partai politik. Kondisi ini diperburuk oleh adanya pandangan bahwa partai politik lebih mementingkan kemenangan dalam pemilu daripada mendengarkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan aspirasi mereka tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh partai politik.

Di sisi lain, media massa dan media sosial sering kali mengangkat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan politisi dari berbagai partai politik. Pemberitaan yang intensif mengenai skandal-skandal ini menambah persepsi negatif masyarakat terhadap integritas partai politik. Terlebih lagi, ketika partai politik gagal memberikan respons yang tegas dan transparan terhadap skandal-skandal tersebut, kepercayaan masyarakat semakin terkikis.

Selain itu, intervensi politik dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan hukum, sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan lebih sering mencerminkan kepentingan sempit elit politik dan sponsor mereka daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Ketidakmampuan partai politik untuk melakukan reformasi internal yang signifikan juga menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Banyak partai yang terus beroperasi dengan struktur hierarkis yang kaku dan budaya politik yang tidak demokratis. Upaya untuk memperkenalkan perubahan sering kali terhalang oleh kepentingan internal dan resistensi dari mereka yang menikmati status quo. Akibatnya,

## Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat

inovasi dan pembaruan dalam strategi partai politik menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik mereka di mata publik.

Secara keseluruhan, kombinasi dari kurangnya transparansi, praktik nepotisme, komunikasi yang buruk, dan kegagalan untuk melakukan reformasi internal menciptakan lingkaran setan di mana masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap kemampuan partai politik untuk membawa perubahan positif. Hal ini mengakibatkan menurunnya partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik, yang justru memperparah krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi partai politik untuk melakukan introspeksi dan reformasi menyeluruh agar dapat kembali menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan sejati dari kepentingan rakyat.<sup>14</sup>

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, partai politik memegang peran krusial dalam demokrasi dengan berfungsi sebagai institusi yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kualitas dan integritas partai politik. Namun, partai politik di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan peran tersebut. Masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap partai politik akibat berbagai kasus korupsi, kurangnya transparansi, dan praktik nepotisme yang merajalela.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik, partai politik harus melakukan reformasi mendalam. Mereka perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan merombak sistem rekrutmen agar lebih berbasis pada meritokrasi. Selain itu, partai politik harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memperbaiki komunikasi dengan konstituen. Dengan demikian, partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagai perwakilan sejati dari kepentingan rakyat dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

---

<sup>14</sup> Hasanuddin. (2018). *Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan partisipasi Politik Rakyat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), hlm. 98–99. Diakses pada 1 Juni 2024 pukul 11:00 dari .  
<https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062>

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryce, J. (1921). *Modern Democracies*. New York: Macmillan, vol. 2.
- Dalton, R. J., & Weldon, S. A. (2005). *Public images of political parties: A necessary evil?* *West European Politics*, 28(5).  
<https://doi.org/10.1080/01402380500310527>
- Djayadi Hanan (2021), *Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*, Lihat Demokrasi Tanpa Demos: refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia,(Depok: Pustaka LP3ES,)
- Hasanuddin. (2018). *Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan partisipasi Politik Rakyat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30).(  
<https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062>)
- Hermansyah, S. H., M. Hum. (2020), *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana)
- Kim, M. (2007). Citizens' confidence in Government, Parliament and political parties. *Politics & Policy*, 35(3), 496–521. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2007.00070.x>
- Klingemann, H. D. (1999). Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis. In P. Norris (Ed.), *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government* (pp. 31-56). New York: Oxford University Press.  
<http://dx.doi.org/10.1093/0198295685.003.0002>
- Kusaka, Kazumasa (2021). *Without the Trust of the People, There Can Be No Government' from the Analects of Confucius*. Japan Economic Foundation, ([https://www.jef.or.jp/journal/pdf/236th\\_Publishers\\_Note.pdf](https://www.jef.or.jp/journal/pdf/236th_Publishers_Note.pdf))
- Muhtadi, Burhanuddin (2013). *Internet, APATISME, Dan Alienasi Politik*. Lembaga Survei, Politik Indonesia, Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilkada, Indikator. (<https://indikator.co.id/internet-apatisme-dan-alienasi-politik/>)
- Nurrudin, & Muhasim, A. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. CV. Alfa Press.  
<https://repository.uinmataram.ac.id/1713/1/BUKU%20HUKUM%20TATA%20NEGARA.pdf>
- Meyer, T. (2012). *Peran Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09836.pdf>
- Robert Huckshom (2014), *Political Parties in America*. Brooks/Cole, Monterey: 1984, hlm. 10. Periksa John Kenneth White, Apakah Partai Politik itu? dalam Richard S. Katz & William Crotty. *Handbook Partai Politik*, terjemahan dari *Handbook of Party Politics*, Bandung Nusamedia.